

DIK RUTIN



LAPORAN KEGIATAN

**DARI KUMPULAN YANG TERBUANG:
PERISTIWA G 30 S 1965 DAN DAMPAKNYA
MENURUT PERSPEKTIF EKS TAHANAN POLITIK PKI DI YOGYAKARTA**

**Oleh:
Mahendra Pudji Utama, S.S.
Dwihendroso, S.S.
Drs. Dhanang Rrespati Puguh, M. Hum.**

Dibiayai dengan Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2004,
sesuai dengan Perjanjian Tugas Pelaksanaan Penelitian Para Dosen Universitas
Diponegoro, Nomor: 1269a/J07.11/PG/2004, Tanggal 5 Mei 2004

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
OKTOBER 2004**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
HASIL PENELITIAN DIK RUTIN**

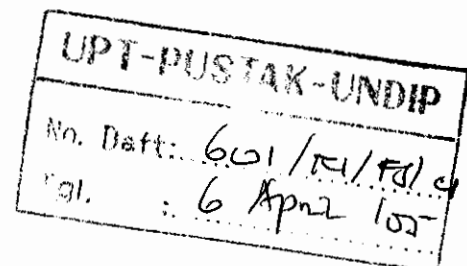
1. a. Judul Penelitian : Dari Kumpulan yang Terbuang:
Peristiwa G 30 S 1965 dan Dampaknya
Menurut Perspektif Eks Tahanan Politik
PKI di Yogyakarta
- b. Kategori Penelitian : Pengembangan Ilmu Pengetahuan
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Mahendra Pudji Utama, S. S.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda/III-A/132231645
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Fakultas/Jurusan : Sastra/Sejarah
- f. Universitas : Universitas Diponegoro
- g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Sejarah
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Kotagede, Yogyakarta
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan
- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
7. Biaya yang Diperlukan : Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)

Semarang, Oktober 2004



Ketua Peneliti,

Mahendra Pudji Utama, S. S.
NIP 132231645



RINGKASAN

A. Judul Penelitian

Judul : DARI KUMPULAN YANG TERBUANG: PERISTIWA G 30 S DAN DAMPAKNYA MENURUT PERSPEKTIF EKS TAHANAN POLITIK PKI DI YOGYAKARTA

Peneliti : Mahendra Pudji Utama, Dwihendroso, Dhanang Rrespati Puguh

Tahun : 2004; 70 halaman

B. Isi Ringkasan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab sebuah persoalan mengenai dampak peristiwa G 30 S tahun 1965 terhadap kehidupan orang-orang PKI yang saat ini berstatus sebagai eks tahanan politik G 30 S. Peristiwa G 30 S dilihat dari perspektif eks tahanan politik G 30 S. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengungkapkan cara mereka menafsirkan atau memaknai pengalaman-pengalaman yang mereka miliki sekaitan dengan keterlibatan mereka di dalam PKI atau komunisme dan merelasikannya dengan kehidupan yang mereka jalani pada masa kini.

Penelitian dilakukan di Kotagede, Yogyakarta, di mana PKI mempunyai pengikut yang besar. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan terutama wawancara sejarah lisan (*oral history*) yang dilakukan dalam dua bagian, yaitu wawancara yang difokuskan pada topik dan wawancara yang ditekankan pada pendekatan pengalaman hidup (*life history*) yang menempatkan pengalaman hidup seseorang dalam konteks sosio-historis. Informan penelitian ini adalah eks tahanan politik kategori B dan C.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa G 30 S telah menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat dan berkepanjangan dalam diri orang-orang yang dinyatakan terlibat PKI. Status eks tahanan politik yang melekat dalam diri mereka telah melemparkan mereka dari struktur sosial. Mereka selalu berada dalam posisi yang ambigu, tidak di sini tetapi juga tidak di sana. Status sebagai eks tahanan politik “membebaskan” orang-orang PKI dari komunisme, tetapi

sekaligus juga “menahan” mereka untuk mendapat pengakuan sebagai warga masyarakat setelah mereka dibebaskan dari tahanan. Akibat lebih lanjut dari hal ini adalah munculnya komunitas eks tapol sebagai kelompok yang tidak berdaya dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh akses ke berbagai bidang kehidupan. Secara politis, mereka kehilangan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu umum, meskipun dalam perkembangan kemudian hak memilih telah mereka dapatkan. Mereka juga kehilangan kesempatan untuk mengambil bagian dalam keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan bersama di lingkungan tempat tinggal mereka. Secara ekonomi, mereka hanya mempunyai peluang untuk memasuki bidang-bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Secara sosial, mereka cenderung untuk menyembunyikan diri dan membatasi diri untuk tidak terlibat secara intens dalam pergaulan sosial.

Eks tahanan politik PKI melihat dan merespons tekanan-tekanan yang mereka alami dengan cara yang berbeda-beda. Bagi eks tahanan politik yang mempunyai pemahaman tentang komunisme relatif lebih baik, menganggap apa yang mereka alami setelah meletusnya G 30 S sebagai bagian dari risiko perjuangan. Sementara eks tahanan politik yang lain menganggap bahwa nasib yang mereka alami sebagai kesalahan PKI. Akan tetapi, umumnya eks tahanan politik sampai saat ini berpandangan bahwa mereka tidak bersalah, sebab menjadi tahanan politik tanpa pernah melalui proses peradilan.

C. Identitas Kelembagaan

Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Nomor 1269a/J07.11/PG/2004, Tanggal 5 Mei 2004.

SUMMARY

A. Title of Research

Title : FROM THE THROWN AWAY COMPILATION: G 30 S PKI EVENTS AND ITS EFFECT ACCORDING TO EX POLITICAL PRISONERS PERSPECTIVE IN YOGYAKARTA

Researchers : Mahendra Pudji Utama, Dwihendrosono, Dhanang Rrespati
Puguh

Year : 2004; 70 pages

B. Content

This research was held to answer a question about the effect of G 30 S 1965 on life of PKI participants who have status as ex political prisoner. This event was viewed by the ex political prisoners of G 30 S PKI perspective. This purposes are to express the way of those people to give meanings on their experience related to their involvement in PKI or communism and to relate it to their present life.

This research was held in Kotagede, Yogyakarta, where PKI had a lot of participants. The data for this research was collected through literary study and oral history interview which underwent in two sessions, they are interview focus on topic and interview emphasize on life history approach that place one's life experience in sosiohistorical context. The informers of this research are ex political prisoners of category A and C.

Result of the research suggests that far away before the G 30 S knock down the Kotagede, the confrontation prospective that involves the PKI have been emerged in a shape of confrontation between PKI and Muhammadiyah. Although Muhammadiyah have a strong support from wholesaler and skippers, whereas the PKI's adherent generally were coming from circle of craftsman labor, but the confrontation wasn't triggered by the social class interest. The conflict between PKI and Muhammadiyah in Kotagede basically came from the difference of organization platform, which boost Muhammadiyah attempt to avoid itself involved in political activities. This implied the difference attitude toward the colonial government who considered as suppress, where PKI have chosen to defend in a way of struggle.

The G 30 S event have been made a severe psychological distress and continuously to peoples who recognized involved on PKI. The status of ex political prisoner which adhered on their self have thrown them away from the social structures. They always lay on ambiguity position, neither here nor there. The status of ex political prisoner set them free from communism but all at once arrested them to gain a confession as a society member after they have been released from the jail. The furthermore results of this thing was the emerge of ex political prisoner community as a group of weakness and hopeless of access opportunity peoples in various aspect of life. Politically, they lost a right of electing and been elected in the event of election, although in develop, they finally have their electing right. They also missed of opportunity to take any part in decisions concerning to their life environment. Economically, they only have an opportunity to enter job area which gave them an income that just adequate for subsistent needs. Socially, the tend to conceal themselves to avoid an intensive involvement in social intercourse.

The ex political prisoner of PKI viewing and responding the stresses that they have experienced in a various way. The group prisoner they increasingly have a relatively better understanding about communism, considered all of the thing they have experienced after the explode of G 30 S is part of defense risks. Whereas the other group, the blamed PKI as the cause of all the bad thing they have experienced. However, generally the ex political prisoner by now viewing that they are innocent, because they become a political prisoner without any judicature process.

C. Institution Identity

Department of History, Faculty of Letter, Diponegoro University, No.: 1269a/
J07.11 /PG/2004, Tanggal 5 Mei 2004.

KATA PENGANTAR

Penelitian ini mendapat gagasan dari sebuah acara dialog tentang rekonsiliasi antara pelaku dan korban G 30 S di stasiun TVRI Yogyakarta pada 1 Oktober 2003 dengan narasumber seorang sejarawan, seorang wakil eks tapol, seorang aktivis LSM yang menaruh perhatian pada upaya rekonsiliasi, dan seorang pejabat militer di Yogyakarta. Dialog itu menunjukkan bahwa wacana dominan, yang melihat PKI sebagai dalang dan pelaku G 30 S, masih belum tergoyahkan.

Kuatnya pengaruh wacana dominan, selain merupakan hasil dari suatu proses sosialisasi yang terus menerus, antara lain juga disebabkan oleh terbatasnya kesempatan bagi pihak lain yang turut terlibat dalam peristiwa G 30 S untuk mengartikulasikan pandangan dan pemaknaan mereka atas peristiwa itu. Penelitian ini bukan dimaksudkan sebagai media artikulasi persoalan yang dihadapi eks tahanan politik G 30 S, melainkan lebih ditujukan untuk merekam sebagian kecil ingatan dan pengalaman orang-orang yang dinyatakan sebagai pelaku dalam peristiwa itu. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan bagi kegiatan ini.

Salah satu kesulitan dalam penelitian ini adalah mendorong informan mempunyai kesediaan yang cukup untuk mengisahkan pengalaman hidup mereka secara jujur dan terbuka. Harus diakui bahwa G 30 S telah menciptakan pengalaman yang traumatik bagi para eks tapol, dan hal ini menjadi penghalang terbesar dalam usaha memperoleh data melalui wawancara sejarah lisan. Perlu waktu yang lebih panjang dan hubungan yang lebih intensif untuk dapat membongkar kisah-kisah yang pernah mereka alami yang selama ini mereka coba kubur dalam-dalam dan bahkan berusaha mereka lupakan. Tim peneliti mengharapkan ada manfaat yang dapat dipetik dari laporan kegiatan ini, sekalipun masih sarat dengan keterbatasan.

Semarang, Oktober 2004
Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
KATAPENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
IV. METODE PENELITIAN	10
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
A. Gambaran Wilayah Penelitian	12
1. Sejarah Singkat Kotagede	12
2. Batas-batas Geografis	17
3. Kelompok-kelompok Sosial	20
B. Partai Komunis Indonesia di Kotagede	24
1. Komunisme di Kampung Santri	24
2. Konflik PKI dan Muhammadiyah	28
3. Kebangkitan Kembali PKI di Kotagede	33
C. G 30 S dan Dampaknya terhadap Kehidupan Eks Tahanan Politik	43
1. Situasi Umum di Yogyakarta Menjelang G 30 S	43
2. Kronologi Peristiwa G 30 s di Yogyakarta	50
3. Situasi di Kotagede	53
4. Pandangan Eks Tapol tentang G 30 S	55
5. Penangkapan dan Penahanan Orang-orang PKI	57
6. Kebijakan tentang “Bersih Diri” dan “Bersih Lingkungan”	61
7. Membangun Identitas Diri	65
VI. KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

I. PENDAHULUAN

Peristiwa G 30 S pada 1965 merupakan salah satu subjek kajian yang mendapat perhatian dari banyak peneliti sejarah, baik Indonesia maupun asing. Paling tidak ada dua kecenderungan yang dapat dilihat dari berbagai kajian tentang peristiwa 1965 yang telah dilakukan. Pertama, kajian-kajian tersebut menitikberatkan pada usaha untuk merekonstruksi jalannya peristiwa dan “menemukan” dalang dari peristiwa tersebut di antara pihak-pihak yang dianggap berperan di dalamnya. Di luar versi resmi yang menyebut PKI sebagai pelaku tunggal sekaligus dalang, terdapat empat versi yang masing-masing menyatakan bahwa tentara (Angkatan Darat), Soeharto, Soekarno, dan CIA sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas peristiwa berdarah itu (Sulistyo, 2000: 47-41). Keempat kajian yang disebut terakhir terutama didasarkan pada sumber-sumber sejarah Indonesia pada kurun tahun 1960-an yang terdapat di luar negeri dan dikoleksi oleh perorangan maupun lembaga. Kecenderungan kedua, di dalam kajian-kajian tersebut hampir dapat dipastikan membicarakan berbagai bentuk kekejaman yang menyertai peristiwa pembunuhan massal orang-orang komunis. Pembunuhan massal dapat dikatakan sebagai dampak peristiwa G 30 S yang sangat nyata dan mudah dilihat serta terjadi secara meluas dilihat dari skala dan cakupan geografisnya (Southwood and Flanagan, 1983; Siregar, 1995; Sulistyo; 2000; Cribb, 2003).

Pada satu sisi, kajian serupa itu mempunyai arti penting, sekurang-kurangnya berperan untuk membangun wacana alternatif tentang peristiwa G 30 S yang multitafsir. Namun di sisi lain, penafsiran yang disajikan seringkali lebih mengakomodasikan pandangan dan pemikiran aktor yang dapat dikategorikan sebagai elit, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal lain yang cukup menonjol di sini adalah belum adanya upaya yang maksimal untuk mendayagunakan informasi-informasi yang berasal dari kelompok yang pernah ditahan akibat peristiwa G 30 S karena dianggap terlibat PKI. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini dan masih hidup sampai kini dikenal sebagai eks tahanan politik (tapol) G 30 S.

Keadaan itu untuk sebagian terjadi karena penelitian sejarah masih berlangsung di bawah prinsip *no document no history* (Adam, 2000). Seturut pandangan ini, maka sejarah sebagai suatu kisah tentang masa lalu bisa disusun seja-

in masa lalu itu meninggalkan jejak-jejak, baik berupa artefak maupun catatan-catatan. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan prinsip kerja tersebut. Persoalannya adalah bahwa pengetahuan sejarah selalu dibatasi oleh rekaman-rekaman atau dokumen-dokumen yang tidak lengkap (Gottschalk, 1986: 29-30). Dalam hal historiografi G 30 S, ketidaklengkapan dokumen itu bahkan merupakan sesuatu hal yang terjadi bukan secara kebetulan. Ada usaha yang secara sengaja dilakukan oleh negara melalui rejim yang berkuasa segera setelah pecahnya peristiwa G 30 S untuk “mengamankan” sumber-sumber informasi (Sulistyo, 2000: x). Selain bertujuan untuk mengendalikan atau membatasi distribusi informasi, usaha-usaha itu juga dimaksudkan untuk mempermudah negara dalam membentuk dan mengontrol pengetahuan publik mengenai peristiwa G 30 S. Akibat lebih lanjut adalah usaha untuk mengungkapkan peristiwa 1965 secara relatif “objektif” dengan memanfaatkan berbagai sumber secara seimbang seringkali membuat kerja akademik dilekati dengan prasangka yang bersifat politis. Pelarangan terhadap peredaran buku-buku yang memuat hasil penelitian atau ungkapan pengalaman pribadi tentang peristiwa G 30 S yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, misalnya, menunjukkan bahwa di mata pemerintah yang berkuasa buku-buku subversif tersebut dianggap membahayakan kelangsungan hidup negara.

Untuk sebagian yang lain, keterbatasan informasi tentang peristiwa G 30 S bersumber dari keengganan para eks tapol untuk memaparkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki mengenai peristiwa tersebut. Ketakutan dianggap bersalah dan akan mendapat kesulitan-kesulitan atas pemaparan pengetahuan dan masa lalu mereka telah membuat eks tapol bukan hanya harus bersikap hati-hati, melainkan juga cenderung tidak memiliki cukup keberanian untuk mengungkapkan kisah dan pengalaman hidup mereka. Langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk melakukan “pembinaan” terhadap eks tapol G 30 S telah mengantarkan mereka sebagai *powerless society*. Masyarakat yang demikian menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pejabat pemerintah, menderita ketidakpercayaan diri yang kronis, ketidakmampuan untuk menyatakan pendapat, dan bahkan ketidakpedulian terhadap nasib sendiri (Triana, 1993). Mereka

cenderung untuk memilih bersikap diam atas apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada diri mereka.

Era reformasi yang antara lain ditandai perkembangan baru berupa transparansi dan demokratisasi, telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi kehidupan masyarakat tak terkecuali dalam kehidupan akademik. Saat ini, cukup mudah bagi kita untuk mendapatkan berbagai tulisan yang membicarakan peristiwa G 30 S dari berbagai perspektif. Karya-karya para sarjana asing juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan secara luas. Reformasi juga telah menciptakan peluang bagi para eks tapol G 30 S yang semula memilih bersikap diam untuk mulai memiliki keberanian mengambil sikap yang lebih terbuka di hadapan orang lain, khususnya untuk mengomunikasikan ingatan sosial mereka atas peristiwa G 30 S.

Meskipun keberanian semacam itu umumnya masih terbatas tampak di dalam ruang-ruang seminar, perkembangan tersebut cukup membesarkan hati. Para peneliti sejarah menghadapi peluang dan tantang baru untuk mengakomodasikan ingatan sosial eks tapol G 30 S di dalam historiografi. Eks tapol G 30 S yang sampai sekarang masih hidup bisa dipastikan telah berusia tua. Apa yang perlu segera dilakukan adalah berusaha menyelamatkan dan mendokumentasikan ingatan sosial mereka melalui kegiatan sejarah lisan. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilakukan, sebab usaha semacam ini akan selalu “berpacu dengan maut” (Thompson, 1988). Sejumlah kajian (Siregar, 1995; Krisnadi, 2001) dan tulisan yang memuat pengalaman pribadi (Ananta-Toer; Setiawan, 2001) mengungkapkan bahwa kisah-kisah tentang tapol G 30 S selama dalam tahanan banyak diwarnai oleh cerita-cerita tentang caci maki, penghinaan, dan berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis. Banyak di antara mereka mengalami cacat fisik permanen dan menderita berbagai penyakit yang semakin mendekatkan mereka dengan maut ketika dibebaskan dari tahanan. Eks tapol G 30 S boleh dikatakan merupakan kumpulan manusia yang bertahan hidup dengan “nyawa saringan” dan cukup dekat dengan keadaan-keadaan yang membuat ingatan mereka atas peristiwa G 30 S terancam tidak bisa diselamatkan dan didokumentasikan.